



## Kampanye Anti-Perdagangan Orang Melalui Kerja Sama International Organization For Migration Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia

Rizka Is'Mi Nurhaliza<sup>1\*</sup>, Natalia Margaretta Hartono Winata<sup>2</sup>, Siti Nurhaliza<sup>3</sup>

Magister Ilmu Komunikasi

<sup>1,2,3</sup> Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

### Abstract

Received: 07 Agustus 2024

Revised: 16 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

*Dalam isu global, perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang banyaknya terjadi pada perempuan dan anak-anak. Oknum Perdagangan manusia selalu mengikuti trend yang ada mulai dari online scam, admin judi online dan sebagainya. International Organization for Migration merupakan organisasi internasional yang membantu dan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, membuat kampanye "Anti-Perdagangan Orang" untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat perdagangan manusia. Kampanye Anti-Perdagangan Orang dilakukan oleh KEMENPPPA dan IOM dengan tujuan untuk melindungi korban ketika sudah melaporkan kepada Lembaga yang berwenang, serta menyelamatkan korban yang masih belum bisa keluar dari kejadian yang masih dialaminya. Hal-hal yang dilakukan oleh IOM dan KEMENPPPA sudah tercantum didalam Gugus Tugas dan Perpres 19 Tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan konsep elemen-elemen kampanye perubahan sosial menurut Kotler dan Roberto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima elemen perubahan sosial yang peneliti gunakan terdapat aspek terkuat yaitu agen perubahan dan terlemahnya adalah target adopters*

**Keywords:** *Elemen Kampanye Perubahan Sosial, Kampanye Anti-Perdagangan Orang, Perdagangan Manusia.*

(\*) Corresponding Author:

[rizkanurhaliza15@gmail.com](mailto:rizkanurhaliza15@gmail.com),

[nataliamargaretta@gmail.com](mailto:nataliamargaretta@gmail.com),

[snurhalizaaa5@gmail.com](mailto:snurhalizaaa5@gmail.com)

**How to Cite:** Nurhaliza, R., Winata, N., & Nurhaliza, S. (2024). Kampanye Anti-Perdagangan Orang Melalui Kerja Sama International Organization For Migration Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 614-629. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13831329>

### PENDAHULUAN

Kampanye anti-perdagangan manusia yang dilaksanakan International Organization for

Migration (IOM) di Indonesia telah berlangsung sejak 2005, dengan fokus pada tiga bidang utama: pencegahan perdagangan manusia melalui peningkatan kesadaran dan pemantauan tenaga kerja; perlindungan korban perdagangan manusia melalui bantuan langsung korban dan peningkatan kapasitas kelembagaan bagi pelaku administratif dan non-pemerintah; Membangun kemitraan lintas sektor untuk Satuan Tugas anti-perdagangan manusia di tingkat nasional dan lokal melalui pengambilan keputusan, perencanaan, dan dukungan keuangan; memperkuat sistem hukum Indonesia dengan meningkatkan penegakan hukum dan memperluas akses keadilan bagi korban perdagangan manusia (Putri, 2019).Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) dan IOM telah melakukan kampanye, yaitu “Anti-Perdagangan Orang” yang telah diselenggarakan pada 30 Juli 2021 lalu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan IOM, yang berisikan talk show bertajuk “Layanan Terpadu bagi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Korban dan Saksi TPPO”. Dikutip dari KemenPPPA, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan bahwa tema yang digunakan sejalan yaitu Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia yang dimana talk show yang dilaksanakan mengangkat tema “Sinergitas Bersama dalam Pemberantasan TPPO”. Bintang juga menyebutkan bahwa tantangan dalam menghapuskan TPPO menjadi lebih sulit di masa pandemic Covid-19, dikarenakan krisis ekonomi jadi meningkat dan membuat kemiskinanpun meningkat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021). Dalam hal inilah para pelaku berusaha untuk mengambil hati para korban dengan cara di iming-imingi akan mendapatkan hidup yang sejahtera dan layak.

Isu keamanan global saat ini mendapat perhatian khusus di semua negara. Terlebih mengenai persoalan yang tidak hanya menyangkut keamanan nasional, tetapi juga keamanan manusia. Perdagangan orang adalah suatu perbuatan yang meliputi perekrutan, perpindahan antardaerah atau internasional, perubahan identitas, keberangkatan, ancaman atau kekerasan fisik atau verbal, penculikan, penipuan, eksploitasi seksual, dan industri prostitusi (Rudy, 2003). Insiden perdagangan manusia sering terjadi di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah seperti kawasan Asia-Pasifik, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Atem, 2017) (Nurfritri Nugrahaningsih, 2020).

Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi khususnya di Indonesia menurut Habibi dalam buku *Human trafficking : penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di indonesia* (Kamal, *Human trafficking : penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di indonesia*, 2019), adalah sebagai berikut :

Faktor ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan, seperti sulitnya mencari pekerjaan dan kurangnya lowongan pekerjaan.; Faktor rendahnya tingkat pendidikan korban membuat masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah kumuh perkotaan dan pedesaan menjadi mangsa yang mudah bagi pelaku yang berjanji untuk mempekerjakan mereka tanpa pendidikan yang tinggi untuk mengelabui korban agar mempercayai apa yang dikatakan pelaku.; Faktor pengangguran dimana pekerjaan tidak tersedia karena kurangnya aplikasi juga berkontribusi terhadap pengangguran. Jika ada yang mau mengisi posisi ini, mereka harus membutuhkan tingkat pendidikan minimum dan gaji yang layak.; Faktor sosial budaya, karena laki-laki terus memiliki peran yang lebih mendominasi dalam masyarakat daripada perempuan. di mana warga juga tidak peduli dengan lingkungan mereka dan kurangnya interaksi sosial mereka.; Faktor lemahnya penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, ada lima variabel yang mempengaruhi kerangka hukum, penegakan hukum (legal structure), sarana dan prasarana, masyarakat umum, dan budaya.

Konsep kampanye yang dilaksanakan oleh IOM dan KEMENPPPA ini memiliki manfaat dan maksud yang sangat besar sehingga dapat membuat masyarakat melek akan kasus-kasus yang terjadi. Kampanye anti-perdagangan orang sangat penting untuk diteliti dikarenakan sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Hal ini juga tidak hanya terjadi kepada perempuan melainkan laki-laki juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Namun, yang dirasakan hingga saat ini yaitu masih dominan kepada perempuan. Kasus ini sudah banyak sekali terjadi baik di kota maupun di desa-desa, dikarenakan kurangnya wawasan mengenai perdagangan orang ini. Kampanye ini memang tidak bisa langsung menyelesaikan kasus-kasus yang ada, namun dengan adanya kampanye masyarakat dapat lebih menyadari akan bahaya yang terjadi dalam kasus perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia juga tidak hanya sekedar dari penjualan atau penipuan mengenai pekerjaan yang akan diberikan secara langsung saja, dikarenakan sekarang sudah banyak modus-modus yang terjadi melalui *scamming online*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian yang berjudul “Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Korban Human Trafficking di Indonesia”, metode yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian dan pengumpulan beberapa jenis bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, kisah introspeksi, kisah hidup, wawancara, observasional, sejarah, interaktif, dan teks visual yang menggambarkan peristiwa sehari-hari, semuanya termasuk dalam penelitian kualitatif. signifikan dan sulit dalam kehidupan seseorang (Bakry U. S., 2016). Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam Creswell (1988:15) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multimode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok permasalahannya. Sementara menurut (Creswell, 1998 : 15), penelitian kualitatif merupakan suatu inkuiri untuk pemahaman berdasarkan tradisi-tradisi inkuiri metodologis yang jelas mengeksplorasi masalah sosial dan manusia (Dr. Drs. Rulam Ahmadi, 2016)

Maka dari itu dalam penelitian ini akan digunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang dimana bukan berisikan angka, melainkan informasi yang dikumpulkan adalah dalam bentuk kata-kata dan gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan mungkin akan menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti. Dengan demikian, untuk memberikan ringkasan penelitian, laporan penelitian akan berbentuk potongan data. Sumber data penelitian ini antara lain transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman videotape, surat pribadi, memorandum, dan catatan resmi lainnya. Peneliti mengevaluasi data yang sangat kaya dan, sejauh mungkin, dalam bentuk yang sesuai sebelum membuat laporan semacam itu. Itu dilakukan seperti seseorang merajutnya, jadi setiap bagian dilihat secara terpisah. Peneliti akan menggunakan pertanyaan yang mencakup frasa mengapa, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana hal itu terjadi. Peneliti tidak akan menyadari bahwa sesuatu sudah seperti itu sebagai hasilnya. (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2021).

Narasumber dalam penelitian ini adalah Aresi Armynuksmono selaku Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Pekerja

dan TPPO, Muhammad Yasser selaku Kepala Unit Counter Trafficking dari International Organization for Migration (IOM) Indonesia, dan Ariani Soejoeti selaku masyarakat. Lalu Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi secara tidak langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi yang dimana merupakan data primer, sedangkan data sekundernya yaitu berupa dokumen dan buku literature. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan lalu diikuti dengan pertanyaan yang lebih mendalam agar menemukan permasalahan masalah secara lebih terbuka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Potret Human Trafficking di Indonesia

Kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia tidak sedikit, melainkan sudah banyak terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat mengenai penipuan yang dilakukan oleh banyak sekali oknum.

**Tabel 1** : Data IOM mengenai Perdagangan Manusia dari 2013-2022 di Indonesia

Tahun	Female	Male
2013	1232	327
2014	484	277
2015	94	1228
2016	133	203
2017	27	51
2018	86	47
2019	93	43
2020	43	111
2021	44	42
2022	95	73

Sumber: Muhammad Yasser, IOM

Dari data yang sudah tercantum diatas, diterangkan bahwa perdagangan manusia tidak hanya semata terjadi pada perempuan, melainkan bisa terjadi pada laki-laki. Hal ini tentu saja dapat menarik perhatian dari para Lembaga yang memiliki kewenangan dan organisasi internasional yang berkecimpung di bidang perdagangan manusia. Dari data diatas, dapat juga terlihat bahwa tiap tahunnya tidak selalu merata karena jumlah korban yang tidak stabil dimana bisa naik dan bisa turun. Perdagangan manusia ini tidak akan bisa berhenti jika masyarakatnya tidak mau dan ada keinginan untuk memberhentikan kasus ini. Tentunya seluruh masyarakat harus ikut andil dalam pengurangan kasus perdagangan manusia ini. Melalui kampanye yang dilaksanakan ini, dapat berpengaruh kepada masyarakat agar bisa lebih menjaga diri sendiri dan dapat memberikan pengaruh terhadap orang lain terlebih ketika terdapat korban yang tidak mau melapor, karena jika tidak mau melapor maka terdapat lebih banyak lagi korban.

#### Upaya Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum yang dilakukan dari pemerintah Indonesia yaitu melalui Perpres 19 Tahun 2023 yang mencakup Rencana Aksi Nasional yang dilaksanakan pada 2020-2024. Namun, terdapat kurangnya pemerintah Indonesia

dalam hal ini. Ketika ada masyarakat yang menjadi korban, pemerintah tidak langsung turun tangan untuk menangkap para pelaku.  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**  
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020 - 2024**

Sumber : Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2023

Dalam Perpres yang tercantum ini merupakan suatu hal yang memang harus dikerjakan sampai waktu yang sudah ditentukan. Penegakan hukum Indonesia dalam kasus perdagangan manusia ini juga diatur didalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 yang membahas mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang berbunyi bahwa setiap warga negara ataupun setiap orang sebetulnya itu mempunyai kewajiban ataupun mempunyai hak dalam melaporkan dan juga melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, serta penerimaan seseorang yang disertai dengan ancaman dan kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan, pengekangan, penipuan, hingga jeratan hutang. Tujuan intimidasi itu agar calon korban bersedia bekerja dibawah kendali orang lain dan bersedia dieksploitasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditangani Polri Capai 57 Kasus (n.d.).

**Cause (Penyebab)**

Isu perdagangan orang terhadap perempuan mulai dari anak-anak sampai dewasa merupakan suatu masalah yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Dalam hal ini, penyebab utama dalam melaksanakan kampanye ini yang dilakukan IOM yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang melakukan migrasi ataupun dari pemerintah yang mempunyai kewenangan itu masih sangat-sangat perlu ataupun sering-sering harus dilakukan seperti itu karena banyak sekali tentang perubahan modus yang selalu berkembang hal-hal tersebutlah yang memicu ataupun yang memang mengharuskan untuk kampanye itu terus dilakukan dengan adanya perubahan.

Dapat dikatakan bahwa dikarenakan zaman yang makin berkembang dan kurangnya kesadaran akan masyarakat maka disaat itulah bisa terjadi perdagangan orang. Menurut peneliti, pemerintah harus bisa berbuat lebih lagi mengenai hal ini mulai dari sosialisasi yang terjadwalkan, lebih bisa memantau masyarakat di pedalaman, bekerja sama dengan kepala desa dan sebagainya. Namun ada persamaan yang dikatakan oleh Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO mengenai penyebab dari perdagangan manusia yang dilaksanakan yaitu kebanyakan faktor ekonomi, namun ada juga faktor di luar itu adalah kekerasan yang mereka alami karena ada beberapa dari mereka bekerja sama agar jauh dari orang yang menyakiti, lalu hal-hal yang lain adalah di iming-imingi

lapangan kerja yang terbatas di daerahnya, ditambah permasalahan kekerasan di yang dialami. Namun faktor ekonomi lah yang dapat menjadi penyebab besar dalam hal ini.

Menurut peneliti, memang kampanye tidak akan dapat menyelesaikan adanya kasus perdagangan manusia yang sudah atau akan terjadi kedepannya. Namun, dengan adanya kampanye ini masyarakat menjadi lebih mengerti dan paham akan kasus-kasus seperti ini.

### **Change Agent (Agen Perubahan)**

International Organization for Migration (IOM) telah menjadi salah satu kolaborator dan aktor kunci dalam perjuangan pemerintah Indonesia melawan perdagangan manusia. Menemukan solusi yang dapat diterapkan untuk masalah migrasi ilegal dan menawarkan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan, apakah mereka pengungsi, baik pengungsi internal, ataupun komunitas lain yang meninggalkan lingkungan mereka.

Tujuan organisasi ini termasuk menawarkan kerja sama internasional dalam isu terkait migrasi, memastikan pengelolaan migrasi yang tertib dan manusiawi, membantu dalam solusi praktis kesulitan terkait migrasi, dan menawarkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi atau imigran yang membutuhkan. orang cacat, orang terlantar lainnya, atau individu. Hak untuk bergerak bebas dan hubungan antara migrasi dan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya keduanya secara eksplisit diakui dalam konstitusi IOM. Selain itu, IOM bekerja di bidang umum manajemen migrasi, termasuk manajemen migrasi paksa, fasilitasi migrasi, manajemen migrasi, dan migrasi dan pembangunan. Penawaran kerjasama dalam hukum imigrasi internasional, diskusi dan konseling kebijakan, advokasi hak-hak imigran, kesehatan imigran, dan aspek gender imigrasi adalah beberapa contoh kegiatan multidisiplin.

International Organization for Migration dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan change agent yang sangat berpengaruh dalam menjalankan kampanye perubahan ini yaitu “Anti-Perdagangan Orang”. Keduanya melakukan kerja sama dalam mengurangi tindak kejahatan transnasional ini. IOM merupakan organisasi yang berfokuskan terhadap migran, termasuk perdagangan manusia. Menurut masyarakat IOM yaitu IOM awalnya organisasi yang lebih operasional, yang artinya sejak awal berdiri sudah mempunyai memberstate yang banyak juga seperti halnya dengan PBB. Tahun 2016, IOM bergabung dengan PBB menjadi UN Migration Agency, lalu lebih berkembang lagi operasionalnya juga, tapi IOM sekarang semua sistem memiliki UN System seperti PBB.

Dapat diketahui bahwa IOM merupakan salah satu organisasi yang sudah bergabung dengan PBB. IOM juga melaksanakan tugasnya di bidang perdagangan manusia. Sama halnya yang dikatakan oleh KEMENPPPA mengenai kerja samanya yang telah dilakukan sejak lama. IOM dan KEMENPPPA melakukan kerja sama dalam pemulangan para korban mulai dari anggaran, izin dan segala macamnya. IOM bukan hanya membantu dalam kampanye nya saja melainkan benar-benar terjun langsung untuk menghadapi dan membantu para korban. Lalu, KEMENPPPA sudah melakukan bimbingan teknis SOP pelayanan terpadu bagi saksi dan korban TPPO dan hal ini sudah dilakukan di beberapa wilayah. IOM bisa melakukan sampai Kabupaten, dan KEMENPPPA hanya di tingkat. Jadi

KEMENPPPA menyelesaikan di tingkat provinsi dan sudah 8 provinsi, salah satunya Jawa Tengah Kalbar Sulsel NTB ya dan NTT

Segala macam cara yang sudah dilakukan oleh IOM dan KEMENPPPA, mulai dari pemetaan, sosialisasi hingga bimbingan teknis bagi para saksi dan korban pun masih belum bisa sepenuhnya membuat kasus ini berkurang. Bahkan tiap tahun pun kasus ini masih bisa terus bertambah.

#### **Target Adopters (Target Perubahan)**

Isu perdagangan manusia ini yang tak kunjung usai pun memiliki target atau sasaran yang dituju. Keberhasilan dari sebuah kampanye pun dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dan setiap orang merasa bahwa mereka memiliki peran yang penting untuk menyadarkan bahwa setiap warga negara ataupun masyarakat itu mempunyai peran penting juga dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam kampanye ini pun, membutuhkan masyarakat agar lebih sadar dan waspada mengenai kejahatan transnasional ini. Setiap orang memiliki peran yang penting untuk permasalahan ini, dimana jika setiap orang memiliki pengetahuan mengenai hal ini maka dapat memberikan informasi kepada orang yang belum mengerti. Lalu perlu diperhatikan lagi untuk melakukan kampanye dikarenakan bisa dilakukan di berbagai media, tidak hanya dari mulut ke mulut saja. Commuter Line merupakan salah satu sarana yang terbaik untuk menyebarkan kampanye, dimana sekarang sudah terdapat layer TV yang dapat dilihat dan ditonton oleh masyarakat yang berada di Commuter Line. Dengan memasang iklan ataupun video melalui kendaraan umum juga merupakan hal yang cukup efektif agar dapat menjangkau masyarakat luas terlebih bagi yang sedang mencari pekerjaan agar tidak mudah untuk tertipu dan terjebak di dalam perdagangan orang.

Dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang tidak peduli akan hal ini dan menganggap sepele atau tidak penting, contohnya di desa yang masih banyak sekali masyarakat yang minim pengetahuan akan hal ini. Sehingga besar sekali harapan dari para Lembaga maupun organisasi yang menjalankan kampanye ini yaitu bagaimana masyarakat terutama di tingkat desa maupun daerah dapat lebih menjaga dan berhati-hati dalam melakukan migrasi yang aman dan menghindari modus atau penipuan yang sering terjadi. Juga, diharapkan masyarakat dapat mengikuti dan ikut berpartisipasi dalam pencegahan perdagangan orang dikarenakan pemerintah, Lembaga maupun organisasi yang berwenang pun tidak dapat menjalankan kampanye sendiri tanpa dibantu oleh masyarakat Indonesia dikarenakan pemerintah juga tidak bisa menjangkau semua ya hanya masyarakat yang bisa membantu apa warganya dalam pencegahan terjadinya perdagangan orang.

Tentunya KEMENPPPA ini mengharapkan masyarakat juga ikut andil dalam hal ini, untuk menyebarkan dan menginformasikan mengenai human trafficking yang terjadi. Menurut peneliti, seluruh masyarakat memang sangatlah berhak menjadi Change Agent, contohnya ketika dosen mengetahui hal ini dapat disampaikan kepada mahasiswanya, lalu orang yang sudah berumur jika mengetahui hal ini juga dapat memberitahukan kepada anggota keluarganya seperti cucu, anak, dan saudara lainnya.

#### **Channels (Saluran Kampanye)**

Dalam melakukan pemaparan ataupun kampanye melalui sosial media ini memerlukan ide-ide yang kreatif, dikarenakan di zaman yang sudah modern ini lebih banyak orang yang tertarik dengan visual yang bagus, contohnya seperti video yang sudah di kreativisasi sedemikian rupa. IOM tahu cara untuk menyebarkan kampanye melalui media sosial dengan kreativitas yang tentunya tidak menyudutkan korban. Ada kalanya pendekatan non konvensional yang berarti seperti bagaimana IOM mengetuk hati atau menarik perhatian orang-orang yang tidak peduli justru. Karna banyak orang-orang yang tidak peduli itu sbenarnya mereka punya resources yang bisa membantu pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas, konten yang positif serta pendekatan emosional dapat dilakukan oleh IOM dalam menyebarkan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat yang lebih luas lagi terlebih untuk masyarakat yang kurang perhatian terhadap kasus ini. IOM mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin maju seperti mereka memiliki website nya sendiri, Instagram, Facebook, Twitter dan penyampaian pesan itu juga biasanya melalui e-komunikasi alat komunikasi informasi dan juga edukasi, lalu ada flyer, buku komik yang biasanya disebarakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah lalu kampus, juga punya beberapa media komunikasi informasi untuk mempublikasi informasi terkait dengan sosial.

Pemerintah dan organisasi yang menjalankan kampanye ini memiliki visi dan misi yang sama yaitu menyadarkan masyarakat agar lebih aware atau berhati-hati dalam kasus yang ada. KEMENPPPA juga meluncurkan video yang mereka buat untuk ditayangkan di Commuter Line selama kurang lebih 6 bulan, lalu media sosial seperti Instagram, Facebook, bahkan Youtube. Segala upaya telah dilakukan oleh dua Lembaga yang berwenang ini. Kampanye ini tidak hanya bisa dilakukan melalui sosial media melainkan dengan cara lain, karena banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti mengenai sosial media. Masyarakat pedesaan, orang yang tidak menggunakan sosial media tidak akan bisa untuk mengakses dan mengetahui mengenai kampanye dan acara-acara seperti seminar dan sebagainya jika hanya dibagikan melalui sosial media. KEMENPPPA berusaha menggunakan alternatif lain seperti memasang iklan di Commuter Line, namun menurut peneliti hal ini juga kurang efektif untuk menjangkau masyarakat di pedalaman karena tidak semuanya juga di daerah terdapat Commuter Line.

**Gambar 1 :** Poster Webinar Mengenai Kampanye Anti-Perdagangan Orang pada tahun 2021



Sumber : International Organization For Migration, 2021  
**Gambar 2** : Poster Sesi Pemotretan Setelah Webinar Hari Dunia Anti Perdagangan Orang pada tahun 2021



Sumber : International Organization For Migration, 2021

Dalam hal ini, KEMENPPPA dan IOM sangat berusaha untuk menggunakan saluran atau media yang digunakan guna menjangkau segala kalangan di masyarakat. Poster-poster yang disebarakan melalui media sosial juga dapat dilihat oleh masyarakat. Namun, kembali lagi tidak semuanya dapat melihat hal ini. Kekuatan dari media sosial sendiri yaitu dapat dijangkau mudah menggunakan smartphone, pc, dan sebagainya. Berita yang disebarakan juga akan terdapat beberapa pendapat atau sudut pandang orang yang berbeda, hal ini membuat masyarakat dapat lebih berfikir dan mencerna hal yang memang benar dan sudah terpercaya. Namun, sosial media juga terdapat kelemahannya yaitu akan dengan mudah penyebaran berita hoax dan tidak adanya pertanggungjawaban dari orang yang menyebarkan berita tersebut, lalu dapat terjadinya penyebaran pelecehan seksual, kekerasan verbal, karena akan banyak sekali orang yang akan menyebarkan hal-hal ini. Sosial media juga dapat terjadi kehilangan privasi dimana bukan kemungkinan kecil, akan ada orang yang meretas data-data tanpa orang yang mempunyai sosial media tersebut tahu. Menurut peneliti juga tidak semua masyarakat menggunakan sosial media, contohnya untuk orangtua yang sudah berumur, tentu saja mereka akan sangat sulit dalam menggunakan sosial media dan sulit untuk memahami. Dikarenakan hanya remaja hingga dewasa saja yang dapat menggunakan teknologi dengan mudah, maka harus diberikan alternatif lain untuk menginformasikan mengenai hal ini.

#### **Change Strategy (Strategi Perubahan)**

Rancangan-rancangan yang telah dilakukan oleh IOM dan KEMENPPPA sudah sangat banyak. Tidak sedikit pula yang sudah berhasil melalui kampanye-kampanye yang mereka jalankan. Mulai dari instrument yang ada hingga Perpres, kampanye yang dilakukan di masing-masing Kementerian lembaga yang masuk di dalam keanggotaan gugus tugas yang mana sudah punya Rencana Aksi Nasional (RNA) yang tertuang di dalam Perpres 19 tahun 2023, yang dimana kegiatan-kegiatan kampanye berada didalam prosesnya. Instrumen maupun Perpres yang terjaga dari awal juga sudah ditetapkan oleh peraturan yang ada di perundangan sehingga tidak ada lagi penyelewengan terhadap apa yang memang harus dikerjakan. Dapat dikatakan juga bahwa rencana-rencana yang tengah dilaksanakan sudah tertuang di dalam Perpres 19 tahun 2023 yang memuat banyak sekali kampanye dan gugus tugas yang harus dijalankan dan dilaksanakan dengan baik dan teratur.

Kekuasaan sangatlah penting demi melakukan kampanye-kampanye yang dilakukan karena semakin besar kekuasaan suatu Lembaga, semakin besar pula masyarakat dapat menerima apa yang dilakukan oleh Lembaga tersebut. Karena KEMENPPPA selain Kementerian yang mempunyai kewenangan terhadap pemberdayaan perempuan dan anak sebagai sekretariat atau ketua harian gugus tugas-tugas tidak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, IOM harus mematuhi dan membantu hal-hal yang dilakukan oleh KEMENPPPA. KEMENPPPA merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan diatas IOM, maka dari itu IOM sangat mengharapkan KEMENPPPA dapat menjalankan tugasnya dengan baik juga mulai dari memastikan mengenai kampanye yang dijalankan hingga kasus-kasus yang tengah dihadapi. IOM juga memiliki kewenangan terhadap terhadap korban ketika melaporkan mengenai kasus yang tengah dihadapi, seperti bagaimana IOM

itu sendiri melakukan take out free terhadap diri sendiri, namun memang masih banyak yang membutuhkan layanan atau bantuan dari pihak ketiga, ataupun yang memiliki kewenangan.

Dapat dikatakan bahwa ketika korban merasa bahwa mereka tidak bisa memiliki kekuatan untuk terlepas dari kasus yang tengah mereka hadapi, mereka dapat mengadukannya kepada IOM maupun Lembaga lain yang memiliki kewenangan. IOM selalu sigap untuk membantu korban-korban yang tidak bisa keluar dari apa yang sedang mereka jalani. Ketika ada proses migrasi biasanya di situlah timbul adanya tindak pidana perdagangan orang. Biasanya kampanye yang kita lakukan tidak hanya fokus isu terhadap TPPOnya tetapi IOM juga melakukan sosialisasi di dalam hal yang beririsan ataupun pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang salah satunya penyeludupan manusia terus sehingga kita biasanya sosialisasi di terkait dengan migrasi.

Sebenarnya KEMENPPPA sudah menyediakan tempat untuk apa latihannya terus ada prosedurnya itu akan sangat mudah dipermudah untuk kalau memang ingin menjadi pekerja migran Indonesia dan juga seharusnya mereka lapor sampai di tempat tujuan di negara tujuan harusnya lapor kepada KBRI atau konjen di sana lapor mengenai keberadaannya dimana dan bekerja dimana. Setiap korban sebenarnya dapat mengadukan hal apapun jika terjadi sesuatu, namun memang terdapat prosedur yang harus dijalankan agar terdapat penyelesaian. Dengan mengadukan hal-hal tersebut maka korban dapat dibantu diselamatkan bahkan dipulangkan ke Indonesia. Namun, masih banyak yang kurang mengetahui ini seperti prosedur-prosedur yang harus dijalankan karena mereka hanya mengikuti perusahaan yang memberikan mereka pekerjaan dan mengirim mereka secara illegal. Tidak sedikit juga yang tidak berani akan melaporkan hal ini karena memang tidak mau menjadi rumit juga harus bolak-balik ke kantor Polisi untuk memberikan apa laporan kembali bikin BAP dan itu yang membuat mereka apa tidak ingin rumit. Padahal yang bikin rumit korbannya sendiri dan memang ada yang diancam tapi juga kadang diiming-imingi diberikan uang agar tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

Mungkin masih kurangnya dorongan dari pihak yang berwenang untuk membuat para korban menjadi jera agar tidak mudah lagi terhasut oleh bujuk dari para pelaku. Namun, terdapat strategi juga yang dilakukan oleh KEMENPPPA yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak mudah menerima iming-iming atau janji-janji yang digembar-gemborkan oleh perusahaan pencari kerja apalagi sekarang kalau pakai apa Streaming Online mereka tidak tahu pelakunya siapa ini yang yang menjadi apa ya menjadi kesulitan bagi kami untuk menelusuri walaupun secara itu tetap bisa dilacak namanya ip-nya atau dari cyber kepolisian yang bisa tahu selain itu juga strategi.

Namun, menurut peneliti hal ini masih kurang akurat dan harus terdapat tambahan yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, maka dari itu KEMENPPPA melaksanakan strategi lain yaitu memiliki program yang bernama desa ramah perempuan dan peduli anak di dalamnya salah satunya untuk pencegahan terjadinya perdagangan orang di tingkat Desa karena kebanyakan masyarakat yang berangkat dari Desa dan mereka sangat minim informasi sehingga mereka lebih banyak tergiur atau termakan oleh rayuan oleh para sponsor-sponsor yang menawarkan perdagangan orang. KEMENPPPA dan IOM terus berusaha

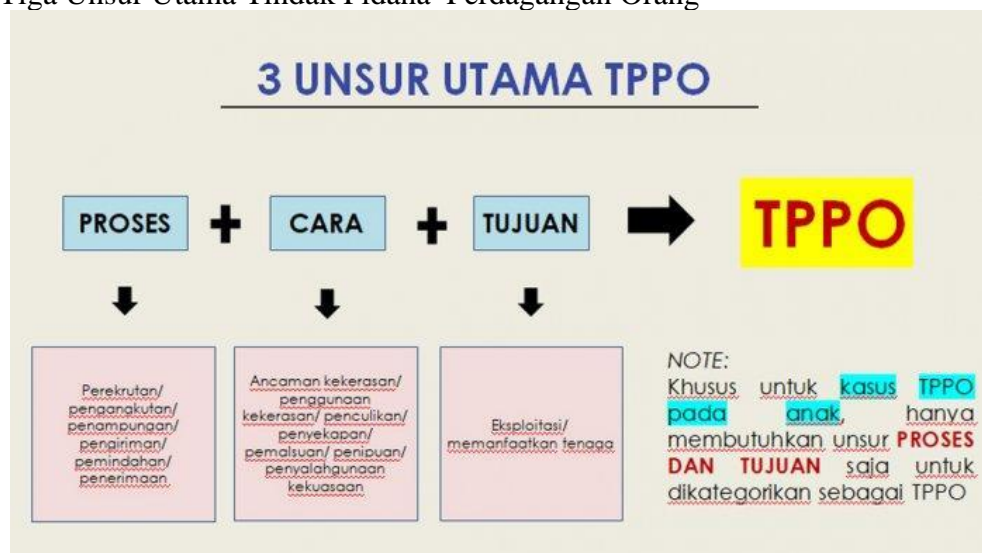
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perdagangan manusia yang terjadi, namun semua itu juga berbalik lagi kepada masyarakat mau mendengarkan atau bersikap seperti acuh. Tidak sedikit juga masyarakat yang menyesal karena mengacuhkan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, menurut peneliti dikarenakan sosialisasi yang dilaksanakan menyamaratakan cara bersosialisasi mulai dari anak-anak hingga orangtua yang sudah berumur, hal ini tidak akan bisa sepenuhnya tersampaikan dengan baik apa yang ingin disampaikan.

## PEMBAHASAN

Tindak kejahatan transnasional yang terjadi ini tak kunjung usai. Hal ini membuktikan bahwa kasus ini terjadi bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di banyak negara. Namun, Indonesia merupakan salah satu negara tertinggi dalam kasus perdagangan manusia. Kekerasan atau Tindakan kejahatan ini dapat terjadi dimana saja, serta memiliki dampak jangka panjang, mulai dari trauma, sakit, hingga kematian pada korban. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sangat memanfaatkan momentumnya untuk melakukan aksinya terhadap orang-orang yang tidak mengerti akan kasus perdagangan orang ini. Banyak orang didalam pedesaan yang tidak melek akan teknologi dan zaman sehingga ketika mulai ada oknum yang menawarkan untuk melakukan pekerjaan ke luar negeri dengan alasan akan mendapatkan uang, maka mereka akan tergiur dan akhirnya menyetujuinya. Namun, ternyata semua itu hanya fiktif belaka yang dimana tidak adanya gaji yang sesuai atau bahkan tidak sedikit juga yang tidak mendapatkan gaji sedikitpun. Hanya penyiksaan yang bisa mereka dapatkan, banyak juga korban yang tidak bisa keluar dari situasi tersebut hingga akhirnya hanya pasrah dengan keadaan. Berikut merupakan gambaran proses terjadinya TPPO pada gambar 13 :

**Gambar 1.**

Tiga Unsur Utama Tindak Pidana Perdagangan Orang



Sumber : Pos-Kupang Wiki.com, 2021

Dari gambar diatas, tentu sangat mudah bagi para pelaku untuk melakukan aksinya, terlebih kepada anak-anak yang ada di pedesaan. Karena mereka akan lebih mudah terpengaruh, hal ini dikarenakan kurangnya wawasan dan penjagaan dari orangtua. Mereka akan lebih tertarik dengan omongan pelaku yang diimingi akan diberikan gaji dengan jumlah yang besar, dan para korban bisa terpengaruh. Banyak orangtua juga yang tidak memikirkan nasib anaknya melainkan hanya berfikiran mengenai ekonominya akan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, orangtua juga butuh untuk diberikan sosialisasi agar tidak begitu saja melepaskan anaknya untuk diperjualbelikan demi ekonomi.

Ternyata perdagangan orang ini terjadi tidak hanya terjadi karena kurangnya kesadaran akan masyarakat, namun dikarenakan pelaku dapat memberikan ancaman sehingga membuat para korban tidak dapat melaporkan hal ini. Pelaku juga memberangkatkan para korban dengan illegal sehingga pemerintah tidak dapat mudah dan cepat untuk menyelesaikan masalah jika ada korban yang melapor, karena sudah dipastikan korban tersebut tidak ada dalam laporan di KBRI atau Konjen, seperti mulai dari kapan datang, negara tujuan, dan tujuan di negara itu untuk apa. Jika hal tersebut dilakukan maka akan dengan mudah dilacak dan diselamatkan.

Adapula yang sudah tau mereka menjadi korban, namun tetap tidak ingin berhenti. Hal ini juga bisa terjadi dikarenakan sudah terjatuh terlalu dalam untuk terus bekerja, bahkan bisa saja mereka akan membawa orang lain untuk bekerja bersama menggunakan perusahaan yang sudah menjadi pelaku. Adapun yang memang dirinya tidak ingin melapor dengan alasan tidak ingin memperpanjang dan menyusahkan diri. Jadi, mereka hanya bungkam tanpa adanya pengakuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dari penelitian ini menemukan bahwa IOM dan KEMENPPPA tidak seluruhnya menerapkan sembilan prinsip strategi komunikasi kegiatan kampanye. Namun, meskipun hanya menjalankan lima prinsip tetap saja mereka sudah menjalankan kampanye dengan baik. Sudah banyak kasus yang mereka tangani, sampai merekapun mengikuti zaman dan terus melakukan pembaruan. IOM dan KEMENPPPA sudah menjalankan lima prinsip yaitu prinsip timbal balik, harapan, asosiasi, konsistensi, dan kekuasaan. Hal ini dilakukan untuk membuat para korban tidak merasa sendiri tapi mereka mempunyai Lembaga yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka tengah hadapi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang yang terjadi di Indonesia bukan hanya dari ekonomi saja, namun kurangnya kesadaran masyarakat akan hal ini. Selain itu, Lembaga yang berwenang juga sudah melakukan yang terbaik yaitu melalui sosialisasi melalui korban, menggunakan sosial media, terus mengikuti

zaman yang semakin banyak sekali macam perdagangan manusia. Namun, tidak semuanya berhasil.

Sudah banyak juga yang berani untuk melaporkan akan hal ini, dan menurut IOM itu merupakan salah satu hal yang dapat dikatakan berhasil dalam mengkampanyekan “anti-perdagangan orang” ini. Segala macam cara juga sudah dilakukan. Besar harapan baik dari masyarakat maupun Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, adanya titik kelemahan pada kampanye yang dijalankan yaitu pemilihan untuk sosialisasi yang kurang, karena mungkin masih banyak yang tidak mengerti akan teknologi terlebih di desa pedalaman. Karenanya, harus dilakukan kerja sama dengan kepala desa ataupun orang yang desa yang memiliki kewenangan untuk menyebarluaskan kampanye “anti-perdagangan orang” ini.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti memberikan saran akademis dan saran praktis yang diharapkan dapat menjadi masukan maupun referensi pada penelitian selanjutnya

### **Saran Akademis**

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat menjadi referensi serta inspirasi bagi penelitian yang akan datang mengenai Kampanye Perubahan Sosial dari Kampanye Anti-Perdagangan Orang yang dimana terdapat aktor utama yaitu IOM dan KEMENPPPA. Penelitian lebih lanjut sangat diharapkan untuk memperluas objek penelitian, juga dapat dikembangkan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif mengenai kampanye anti-perdagangan orang terhadap kasus yang ada di Indonesia.

### **Saran Praktis**

Adapun saran praktis yang diberikan pada penelitian ini ditunjukkan kepada masyarakat dan Lembaga indonesia yang mempunyai kewenangan. Untuk masyarakat diharapkan agar bisa memanfaatkan informasi yang ada baik melalui sosial media maupun sosialisasi yang dilakukan oleh IOM dan KEMENPPPA. Dikarenakan kurangnya melek akan informasi dan teknologi terlebih di desa pedalaman yang mudah sekali terdampak dan terpengaruh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sedangkan untuk pemerintah Indonesia yaitu KEMENPPPA agar semakin memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai human trafficking dan kampanye anti-perdagangan orang dikarenakan tidak semua masyarakat terkhusus untuk para korban menggunakan media atau saluran yang digunakan oleh KEMENPPPA dan IOM dalam melakukan kampanye. Kemudian, diharapkan IOM dapat membantu KEMENPPPA lebih luas lagi, seperti lebih sering tau mungkin dapat dijadwalkan untuk melakukan sosialisasi. Hal ini dapat berdampak positif jika dilakukan secara rutin. Karena tidak seluruh masyarakat mengerti menggunakan teknologi dan bisa saja tidak percaya akan hal-hal yang dikatakan melalui internet. Diharapkan juga dapat melakukan lebih luas lagi di pedalaman Indonesia. Lalu diharapkan pula untuk memberikan sosialisasi dengan membedakan cara berkomunikasinya. Ketika dengan remaja menggunakan pembawaan yang lebih santai dan asik. Ketika dengan anak-anak diberikan informasi mengenai dasarnya apa itu perdagangan manusia. Lalu, dengan orangtua menginformasikan mengenai

kasus-kasus yang sudah ada dan memberitahukan untuk tetap memperingati anak-anaknya agar tidak terjerumus akan hal ini apapun masalah yang dihadapi, jika memang ingin tetap bekerja diluar negeri harus menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI PEMENUHAN DIMENSI-DIMENSI KEAMANAN MANUSIA: KASUS PERDAGANGAN MANUSIA KABUPATEN CIANJUR. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>
- Bakry, D. U. (2017). In *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (p. 73-194). Depok: Kencana.
- Bakry, U. S. (2016). In *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (pp. 14-15). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bintari, A., & Djustiana, N. (2017). UPAYA PENANGANAN KORBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT. *Cosmogov*, 1(1), 124. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11803>
- Istiqomah, N. (2020). In *Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 20-91). Batu: Literasi Nusantara.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn).  
Kemenparekraf.Go.Id. Retrieved May 12, 2023, from [https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data\\_puu/Perpres%20Nomor%2019%20Tahun%202023%20tentang%20RAN%20PP%20TPPO%20TAHUN%202020-2024.pdf](https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data_puu/Perpres%20Nomor%2019%20Tahun%202023%20tentang%20RAN%20PP%20TPPO%20TAHUN%202020-2024.pdf)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian pada Kabinet Kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. (2021).  
Kemenpppa.Go.Id. Retrieved June 26, 2023, from <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/7441a-page-1.-informasi-kelembagaan-kpp-pa.pdf>
- Moleong, Lexy J, M. (2021). *Metode penelitian Kualitatif* (p.11). Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Mohammad A. M. (2014). *Metode Penelitian Praktis : Kuantitatif & Kualitatif* (p. 176-207). Jakarta: Publica Institute
- Muyasaroh, S. (2013). Kampanye Perubahan Sosial (Kesadaran Masyarakat, Aspek Perubahan Kognitif dan Prilaku). *Jurnal Yudharta*, 17-30. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/view/831>
- Najib Yunardi, A. (2022). Peran International Organisation for

Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i2.5600>

Novemyleo. (2021). *Apa Itu TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PosKupang Wiki. Retrieved August 10, 2023, from <https://poskupangwiki.tribunnews.com/2021/11/13/apa-itu-tppo-tindak-pidana-perdagangan-orang?page=all>

Nugrahaningsih, N., Alunaza, H., & Lutfie, R. Z. (2020). The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1). <https://doi.org/10.18196/hi.91163>

Rumlah, S. (2022). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(2), 91–97. <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.17771>.